



IPB University
— Bogor Indonesia —

POLICY BRIEF

2024

Kebijakan dan Implementasi Program B2SA

Penulis:

Ali Khomsan

Hadi Riyadi

Dodik Briawan

Karina R Ekawidyani

Tursina Andita Putri

Elma Alfiah

Muayanah Hardiah

Vanesha Miranda

Hana Fatimah



Departemen Gizi Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia
IPB University

Tantangan Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang terkait erat dengan kecukupan konsumsi dan ketersediaan pangan. Namun, kerawanan pangan yang masih terjadi di berbagai wilayah telah memicu masalah gizi, khususnya pada kelompok rentan seperti balita (Islamiah et al., 2022).

Balita, sebagai kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan, sering kali menjadi korban utama ketidakseimbangan gizi. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai 21,5%, jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 (Picauly et al., 2023). Salah satu faktor utamanya adalah kebiasaan orang tua yang belum optimal dalam menyediakan makanan sehat dan bergizi.

Indeks ketahanan pangan Indonesia juga menunjukkan posisi yang memprihatinkan. Menurut *Global Food Security Index (GFSI) 2022*, skor Indonesia hanya 60,2, lebih rendah dari rata-rata global (62,2) maupun Asia Pasifik (63,4). Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) sebesar 8,53% semakin mempertegas tingginya tingkat kerawanan pangan. Tantangan utama dalam GFSI di Indonesia adalah kurangnya diversifikasi pangan, di mana konsumsi sayuran, buah-buahan, dan protein lokal masih rendah, sementara konsumsi padi-padian, minyak, dan lemak berlebih (Suhaila et al., 2024).

Untuk menjawab tantangan ini, Badan Pangan Nasional meluncurkan Program B2SA. Program ini dirancang untuk mendorong konsumsi pangan lokal, mengedukasi masyarakat, dan memberdayakan komunitas lokal melalui tiga pilar utama: Teras Pangan, Gerai Pangan, dan Rumah Pangan. Evaluasi program di Kabupaten Pesawaran (Lampung) dan Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) menunjukkan hasil positif, dengan metode survei kuantitatif dan wawancara mendalam. Survei terhadap ibu balita mencatat bahwa 90-100% responden memberikan penilaian positif terhadap manfaat program, seperti peningkatan akses pangan bergizi dan penghematan pengeluaran pangan. Analisis rasio *Benefit/Cost* menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat ekonomi 2,71 kali lipat dari biaya di Jawa Barat, dan 4,23 kali lipat di Lampung.



Gambar 1 Dampak program B2SA berdasarkan temuan kualitatif

Rekomendasi Kebijakan

Di tengah dampak positif yang dirasakan, keberlanjutan manfaat program ini menghadapi beberapa tantangan. Durasi pelaksanaan yang hanya empat bulan terbukti efektif untuk memperbaiki status gizi akut (BB/TB), tetapi belum cukup untuk menangani masalah gizi kronis seperti stunting (TB/U) yang memerlukan intervensi jangka panjang. Selain itu, cakupan program yang terbatas pada wilayah tertentu membuat manfaatnya belum merata, terutama di desa-desa terpencil dengan prevalensi stunting tinggi. Kendala logistik, seperti sulitnya akses transportasi, juga menjadi hambatan signifikan dalam distribusi bahan pangan dan pelaksanaan kegiatan edukasi. Berdasarkan evaluasi dan temuan tersebut, berikut rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi B2SA di masa mendatang:

1. Perpanjangan Durasi Program untuk Dampak Jangka Panjang

Durasi pelaksanaan program B2SA yang hanya empat bulan belum cukup untuk memberikan dampak signifikan pada masalah gizi kronis seperti stunting. Perpanjangan durasi menjadi 6-12 bulan diperlukan untuk memastikan perbaikan yang lebih terukur pada indikator gizi kronis (TB/U) sekaligus mempertahankan perbaikan indikator akut (BB/TB dan BB/U). Dengan intervensi jangka panjang, program ini dapat memberikan dampak lebih besar dan berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat. **Instansi Terkait:** Badan Pangan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah.

2. Penguatan Pilar Teras, Gerai, dan Rumah Pangan sebagai Inti Keberlanjutan Program

Pilar utama program B2SA perlu diperkuat untuk memberikan dampak yang lebih luas dan efisien:

➤ **Teras Pangan:**

Teras Pangan telah membantu ibu-ibu balita memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan bahan pangan lokal. Inisiatif ini meningkatkan akses keluarga terhadap bahan pangan segar dengan biaya rendah, sekaligus mendorong kemandirian pangan rumah tangga. Penguatan Teras Pangan dapat dilakukan melalui pelatihan bercocok tanam, distribusi bibit unggul, dan pengadaan alat-alat pertanian sederhana.

➤ **Gerai Pangan:**

Gerai Pangan berperan sebagai jembatan antara hasil panen Teras Pangan dan konsumsi rumah tangga. Inisiatif ini mendukung sistem distribusi bahan pangan lokal yang lebih efisien dengan berbasis komunitas. Penguatan Gerai Pangan dapat mencakup peningkatan akses logistik lokal, penyediaan alat distribusi sederhana, dan pemberdayaan UMKM lokal dalam proses distribusi.

➤ **Rumah Pangan:**

Rumah Pangan telah menjadi pusat pengolahan bahan pangan lokal menjadi makanan bergizi yang diterima dengan baik oleh keluarga penerima manfaat. Penguatan Rumah Pangan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan mengolah makanan bergizi, penyediaan alat masak, dan inovasi menu berbasis lokal.

Instansi Terkait: Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah.

3. Perluasan Cakupan Daerah

Program B2SA perlu diperluas ke daerah lain dengan prevalensi stunting tinggi, terutama di wilayah terpencil. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pendanaan dari dana desa, alokasi khusus dari Badan Pangan Nasional, serta kemitraan dengan sektor swasta. Perluasan cakupan program memungkinkan lebih banyak keluarga menerima manfaat dari inisiatif ini. **Instansi Terkait:** Kementerian Keuangan;

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan pemerintah daerah.

4. Dukungan Logistik dan Infrastruktur Lokal

Tantangan logistik perlu diatasi melalui penguatan infrastruktur lokal seperti pusat penyimpanan bahan pangan di tingkat desa dan penyediaan transportasi untuk wilayah terpencil. Insentif bagi kader PKK, seperti pelatihan, penghargaan, atau tunjangan transportasi, juga diperlukan untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan berkelanjutan. **Instansi Terkait:** Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.

Daftar Pustaka

[Bapanas] Badan Pangan Nasional. 2023. Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Jakarta: Badan Pangan Nasional.

Islamiah WE, Nadhiroh SR, Putri EBP, Farapti, Christiwan CA, Prafena PK. 2022. Hubungan Ketahanan Pangan Dengan Kejadia Stunting Pada Balita dari Keluarga Nelayan. *Media Gizi Indones*. 17(1SP):83–89.

Picauly I, Sakke Tira D, Pellokila M. 2023. Pentingnya Pola Makan Beragam, Bergizi, Seimbang, Dan Aman Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. *J Pengabdian pada Masyarakat Lahan Kering*. 4(1):9–17. doi:10.51556/jpkmkelaker.v4i1.235.

Suhaila, Yუსlainiwati, Yamin L, Sutalhis M, Novaria E. 2024. Efektivitas promosi program B2SA dalam upaya pencegahan stunting di 5 wilayah Sumatera Selatan. *J Ilmu Pengetah*. 4(3):306–314.

Survei Kesehatan Indonesia. 2023. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.